

Dani, R., Saam, Z., Siregar, S.H  
2013:7 (2)

**STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR  
KOTA SELATPANJANG**

**Risqiana Dani**

*Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti*

**Zulfan Saam**

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru,  
Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.*

**Sofyan Husein Siregar**

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru,  
Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.*

***Management Strategy of Coastal Settlement Region Selatpanjang City***

**ABSTRACT**

*Coastal settlement region with all the uniqueness of nature, beauty and appeal is an ideal area for development of settlement activity. The fact that the population growth rate is high will result in changes to the existing ecosystem. Environmental conditions of coastal Selatpanjang city not arranged properly, moreover high level of poverty is one of reason the decent settlement have not been fulfilled. The purpose of this study is to identify the characteristics of the coastal settlement Selatpanjang city, analyzed the usefulness of physical settlement as a living space, to support social, cultural and economic activities and to determine the management strategies of coastal settlement Selatpanjang city. This study is using the method of survey research and to transform quantitative data into qualitative data use a Likert scale. The result of this study found that the characteristics of the coastal settlements of Selatpanjang city is dominated by the use of land up the majority of population is used as a settlement, settlement condition is largely a non-permanent settlements and semi-permanent, and not the presence of coastal buildings yet. Physical conditions compatibility level of the settlement as a living space with a residential component of legality, building structure, the living space per occupant, water supply, availability of bathroom facilities, trash heap services and the electricity grid was found that the condition of occupancy "Less Under" as a living space, the next level of concordance as a means of supporting social, cultural and economic activities of coastal communities Selatpanjang city with assessment component of health, education, religious duties, government and public services, open area, trade and services obtained results "Less Under", so it is necessary to repair or provision of the settlement. Strategic management of the coastal settlement Selatpanjang city to do with the control of land use, increased as a function of residential living space, improving the quality of neighborhoods as well as the improvement of housing facilities and infrastructure.*

*Keywords: Coastal Settlement Region, Compliance rate and Strategy Management*

## **PENDAHULUAN**

Suatu kenyataan umum bahwa masalah lingkungan hidup merupakan salah satu masalah berat yang harus dihadapi. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia pada saat ini masih ditandai oleh rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, menurunnya kualitas lingkungan permukiman, di mana kualitas pelayanan perumahan dan permukiman yang ada masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai. Kawasan permukiman pesisir dengan segala keunikan alam, keindahan dan daya tariknya merupakan kawasan yang sangat ideal bagi pengembangan kegiatan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan berdampak pada perubahan ekosistem yang ada.

Kota Selatpanjang sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai paling berpengaruh pada perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti, selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Selatpanjang juga sudah menjadi pusat kegiatan bagi kawasan sekitarnya sejak lama. Berada di pesisir Pulau Tebing Tinggi, karakteristik Kota Selatpanjang menunjukkan perkembangan lebih ke arah laut atau pesisir pulau. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian berupa perdagangan barang dan jasa bermunculan di bagian utara Kota Selatpanjang.

Kondisi lingkungan pesisir Kota Selatpanjang belum tertata dengan baik, ditambah lagi dengan tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu kebutuhan akan permukiman layak belum terpenuhi. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang, menganalisis tingkat kesesuaian fisik permukiman sebagai ruang tinggal, sebagai penunjang kegiatan sosial budaya dan ekonomi serta menentukan strategi pengelolaan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data (Gulo, 2004). Pengambilan data dilakukan terhadap 89 sampel dari masyarakat dan 5 orang sampel dari Pemerintah Daerah, sehingga sampel berjumlah 94 orang (Kusmayadi, 2000).

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik kawasan pesisir Kota Selatpanjang meliputi kondisi fisik dasar (topografi, morfologi pantai dan vegetasi pantai, kondisi fisik binaan (penggunaan lahan, sarana publik, jaringan jalan, sistem drainase dan bangunan pelindung pantai) dan karakteristik sosial (jumlah dan komposisi penduduk). Analisis deskriptif-evaluatif digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman sebagai ruang tinggal, sarana penunjang kegiatan

sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir Kota Selatpanjang yaitu dengan pembobotan, skoring dan pemeringkatan. Skala pengukuran yang digunakan adalah *skala likert* untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif (Singarimbun, 1995). Terdapat beberapa komponen yang dianalisis meliputi, tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman sebagai ruang tinggal komponen yang dianalisis meliputi legalitas tanah hunian, struktur bangunan, rasio luas ruang per penghuni, ketersediaan air bersih, fasilitas kamar mandi, pelayanan persampahan dan jaringan listrik. Selanjutnya analisis tingkat kesesuaian fisik permukiman sebagai sarana penunjang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi komponen yang dianalisis meliputi: sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, ruang terbuka dan perdagangan dan jasa. Metode *development* yang digunakan adalah SWOT untuk menentukan strategi pengelolaan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang yang terdiri dari *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threat* (ancaman).

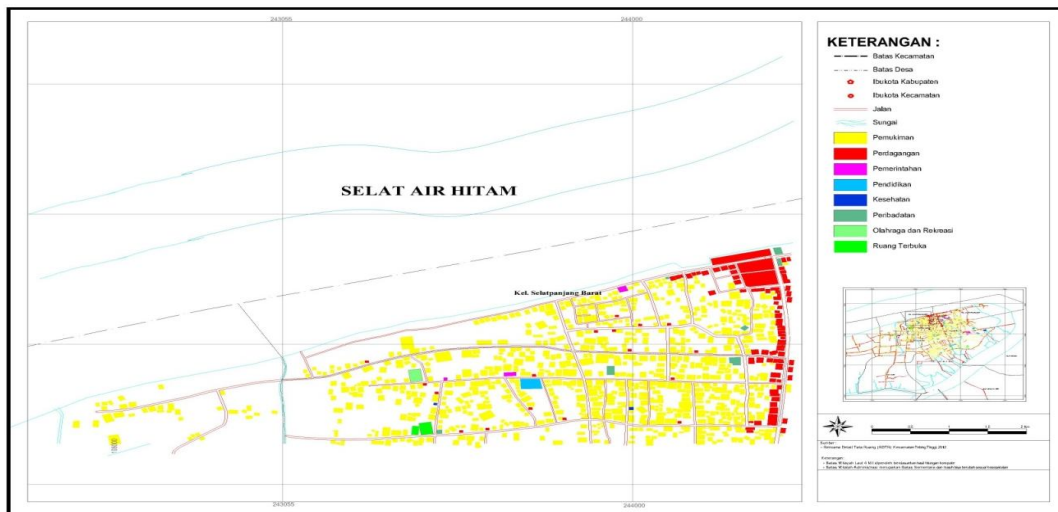
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Karakteristik kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang

Kondisi topografi kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 5-7 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang ada berupa jenis vegetasi yang umumnya berada di daerah pesisir seperti tanaman bakau, kelapa dan lain-lain. Merupakan tipe morfologi pantai yang landai yang didominasi oleh endapan rawa yang berupa lumpur, liat dan bahan organik.

Kawasan pesisir Kota Selatpanjang didominasi oleh penggunaan lahan terbangun dengan perbandingan persentase luasan lahan terbangun adalah sebesar 77% dan luasan lahan tidak terbangun sebesar 23% yang mayoritas lahan terbangun digunakan sebagai permukiman penduduk (Gambar 1). Hal ini sesuai dengan Doxiadis (1968) menyebutkan bahwa suatu kawasan perukiman dipengaruhi oleh letak geografis, lingkungan alam dan binaan serta sarana dan prasarana. Kondisi permukiman yang tersebar tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada bagian utara kota. Sebagian besar permukiman penduduk berlokasi di sisi sepanjang jaringan jalan dan belum tertata dengan baik. Sarana publik yang terdapat pada wilayah studi hanya berupa satu unit lapangan sepak bola. Kondisi jaringan jalan yang ada mayoritas dalam kondisi buruk, khususnya jalan-jalan utama yaitu Jalan Imam Bonjol, Ahmad Yani, Ibrahim dan Nusa Indah dirasakan masih sempit karena lebar jalan yang belum memadai untuk jumlah kendaraan yang ada, ditambah lagi tidak adanya lahan parkir sehingga menggunakan bahu jalan. Pada saat hari hujan, air akan menggenangi jalan dikarenakan drainase yang ada terdapat banyak sampah dan dalam kondisi tertutup. Pada wilayah studi jalan yang ada belum terdapat median jalan dan trotoar. Belum terdapatnya bangunan pengaman pantai/turap di wilayah studi menyebabkan adanya ancaman abrasi yang akan merusak permukiman dan infrastruktur yang berada di tepi pantai. Berdasarkan Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (2007) bahwa lebar sempadan pantai minimal 30 meter untuk kawasan permukiman agar terhindar dari ancaman abrasi.

Jumlah penduduk di wilayah studi berjumlah 472 jiwa dan 765 Kepala Keluarga, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, nelayan dan buruh.



Gambar 1. Penggunaan Lahan di Wilayah Studi

## II. Tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman sebagai ruang tinggal

### Legalitas tanah hunian

Persentase status tanah hunian di wilayah studi sebagian besar merupakan Surat Keterangan Tanah (SKT) (50,5%) sedangkan Sertifikat Hak Milik sebesar 34,8% dan tidak memiliki sertifikat sebesar 14,7%, di mana merupakan hunian yang berada di tepi laut yang berbatasan langsung dengan wilayah pasang surut. Hunian yang tidak memiliki sertifikat adalah hunian yang berada di atas laut, hunian yang melanggar sempadan pantai dengan mayoritas pemilik bermata pencaharian sebagai nelayan. Diketahui bahwa hunian yang tidak memiliki sertifikat adalah dikarenakan pemilik bangunan belum mampu secara finansial untuk melegalkan status tanah yang ada.

### Struktur bangunan

Kondisi struktur bangunan rumah di wilayah studi mayoritas merupakan bahan kayu/papan yaitu sebesar 64%, struktur bangunan campuran antara kayu dan batu sebesar 28,1% dan struktur bangunan rumah batu sebesar 7,9%. Sebagian besar rumah penduduk hanya terdiri dari 1 (satu) lantai, sedangkan rumah dengan lantai lebih dari satu lantai cenderung merupakan rumah dengan struktur batu dan didominasi oleh rumah toko (ruko).

### Rasio luas ruang per penghuni

Rasio luas ruang per penghuni pada wilayah studi didapatkan dengan cara membagi luasan hunian dengan jumlah penghuni yang terdapat di suatu hunian (Suganda, 2009). Berdasarkan hasil survey di lapangan didapatkan bahwa mayoritas di wilayah studi rasio luas ruang per

penghuni > standar minimum ( $7,2 \text{ m}^2$ ) sebesar 52,8% sedangkan rasio luas ruang per penghuni  $\leq$  standar minimum ( $7,2 \text{ m}^2$ ) sebesar 47,2%.

### **Ketersediaan air bersih**

Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih di wilayah studi disebabkan belum terdapatnya pipa PDAM yang melayani wilayah studi serta sumber air bersih yang tergolong sulit pada wilayah Kota Selatpanjang umumnya. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah studi mayoritas dilakukan secara swadaya yaitu dengan menampung air hujan pada masing-masing rumah (84,3%) dan menggunakan sumur bor umum sebesar 15,7%.

### **Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan penanganan air limbah**

Sebagian besar ketersediaan fasilitas kamar mandi di wilayah studi terpisah dengan bangunan utama atau tidak berada di dalam rumah mayoritas kamar mandi belum dilengkapi dengan *septictank*. Ketersediaan fasilitas kamar mandi di wilayah studi mayoritas kamar mandi/toilet tidak berada di dalam rumah/bangunan utama (61,8%) sedangkan kamar mandi/wc yang berada di dalam rumah sebesar 38,2%. Pengelolaan limbah di kawasan permukiman pesisir dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga. Fasilitas pembuangan limbah secara *on site* menggunakan *septic tank*, cubluk dan sisanya menggunakan tempat terbuka atau laut sebagai fasilitas pembuangan limbah. Pada sistem *on site* yang diterapkan umumnya adalah buangan tinja dialirkan ke *septictank* dan air bekas mandi atau cucian dialirkan ke saluran drainase yang ada disekitar rumah.

### **Pengelolaan sampah**

Pengelolaan sampah yang ada masih bersifat individu yaitu masing-masing hunian. Pembuangan sampah oleh masyarakat mayoritas dilakukan dengan cara membuang sampah langsung ke laut tetapi ada juga yang langsung membakar sampah yang ada. Pengelolaan sampah yang dilakukan mayoritas dengan cara membakar sampah sebesar 48,3% dan juga membuang sampah yang ada ke laut tanpa diolah terlebih dahulu (42,7%). Sementara itu di wilayah studi belum terdapat petugas sampah yang mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

### **Jaringan listrik**

Kebutuhan listrik, seluruh masyarakat di wilayah permukiman pesisir Kota Selatpanjang sudah mendapat pelayanan listrik. Masih terdapat sekitar 21% rumah tangga yang pelayanan listriknya berasal dari sambungan rumah lainnya. Hal ini dikarenakan PT. PLN Selatpanjang sebagai penyedia tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat umum belum dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sepenuhnya.

**Penilaian tingkat kesesuaian kondisi hunian sebagai ruang tinggal**

Berdasarkan klasifikasi penilaian tingkat kesesuaian pada kondisi hunian yaitu diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS) dan Sesuai (S) dengan skor 1 sampai dengan 3.

Dari penilaian tingkat kesesuaian komponen hunian sebagai ruang tinggal pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari tujuh komponen hunian dengan tingkat klasifikasi nilai Sesuai (S) sebanyak satu komponen terdiri dari jaringan listrik, Kurang Sesuai (KS) sebanyak dua komponen yaitu legalitas hunian dan ketersediaan fasilitas kamar mandi, sedangkan komponen hunian dengan klasifikasi Tidak Sesuai (TS) sebanyak empat komponen yaitu struktur bangunan, rasio luas ruang per penghuni, ketersediaan air bersih dan pelayanan sampah.

Tabel. 1 Penilaian Tingkat Kesesuaian Komponen Hunian Sebagai Ruang Tinggal

No.	Komponen Hunian	Parameter	Skor
1.	Legalitas hunian	Jumlah bangunan dengan status Surat Keterangan Tanah (SKT) = 50,5%	2
2.	Struktur bangunan	Jumlah bangunan temporer/non permanen (kayu) = 64%	1
3.	Rasio luas ruang per penghuni	Jumlah bangunan dengan rasio luas ruang per penghuni kurang dari standar ambang (7,2 m <sup>2</sup> /orang) = 47,2%	2
4.	Ketersediaan air bersih	Pelayanan air bersih oleh PDAM = 0%	1
5.	Ketersediaan fasilitas kamar mandi	Kepemilikan fasilitas kamar mandi = 38,2%	2
6.	Pelayanan sampah	Jumlah rumah yang terlayani petugas sampah = 0%	1
7.	Jaringan Listrik	Jumlah rumah yang terlayani jaringan listrik = 78,7%	3

Sumber : Hasil perhitungan dan analisis, 2013

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah Komponen}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kesesuaian} &= \frac{12}{7} \\ &= 1,71 \end{aligned}$$

Dari nilai rata-rata tersebut menyatakan bahwa kondisi hunian sebagai ruang tinggal di permukiman pesisir Kota Selatpanjang “Kurang Sesuai”, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas/kondisi hunian beserta penunjangnya agar layak dan sesuai sebagai ruang tinggal. Komponen yang perlu diperbaiki adalah komponen legalitas hunian, struktur bangunan, ketersediaan air bersih, ketersediaan kamar mandi, dan pelayanan sampah.

**Tingkat kesesuaian kondisi sarana sebagai penunjang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat**

**Sarana kesehatan**

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pada wilayah studi sarana kesehatan yang ada berupa praktek dokter berjumlah 1 unit berada di Jalan Teratai (Gambar 2) dalam kondisi baik dilihat dari struktur bangunan, namun jika dilihat dari segi ketersediaan ruang

dan fasilitas yang ada kurang baik. Selain praktek dokter terdapat juga 4 unit posyandu yang masing-masing berada di Jalan Belanak, Jalan Ibrahim, Jalan Teratai dan Jalan Suak Nipah, namun hanya 1 posyandu yang memiliki bangunan tersendiri yaitu yang berada di Jalan Suak Nipah, tiga kegiatan posyandu yang lain masih menumpang di kantor Lurah Selatpanjang Barat dan rumah penduduk.

### **Sarana pendidikan**

Jumlah kebutuhan sarana pendidikan adalah berupa satu unit Sekolah Dasar. Kondisi di lapangan sudah terdapatnya Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Jalan Ibrahim (Gambar 2) dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar sudah sesuai dengan standar minimal yaitu setiap 1.000 jiwa minimal terdapat 1 unit Sekolah Dasar, hal ini sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan, dimana jumlah penduduk usia sekolah dasar berjumlah 1.579 jiwa.

### **Sarana peribadatan**

Ketersediaan sarana peribadatan pada wilayah studi yaitu berupa satu unit Musholla/langgar dan satu unit masjid untuk menampung kebutuhan masyarakat yang beragama Islam. Musholla/langgar yang berada di jalan Nusa Indah (Gambar 2) sudah dalam kondisi kurang layak dikarenakan bangunannya yang semi permanen dan sudah tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan Masjid warga yang berada di Jalan Ibrahim dalam kondisi baik dari segi struktur bangunan, namun lokasinya belum bebas banjir. Khususnya pada saat pasang besar maka air akan naik hampir mencapai lantai masjid. Berdasarkan standar jumlah sarana peribadatan yang ada masih kurang, di mana dibutuhkan empat unit musholla yang ditempatkan pada setiap Rukun Warga (RW).

### **Sarana pemerintahan dan pelayanan umum**

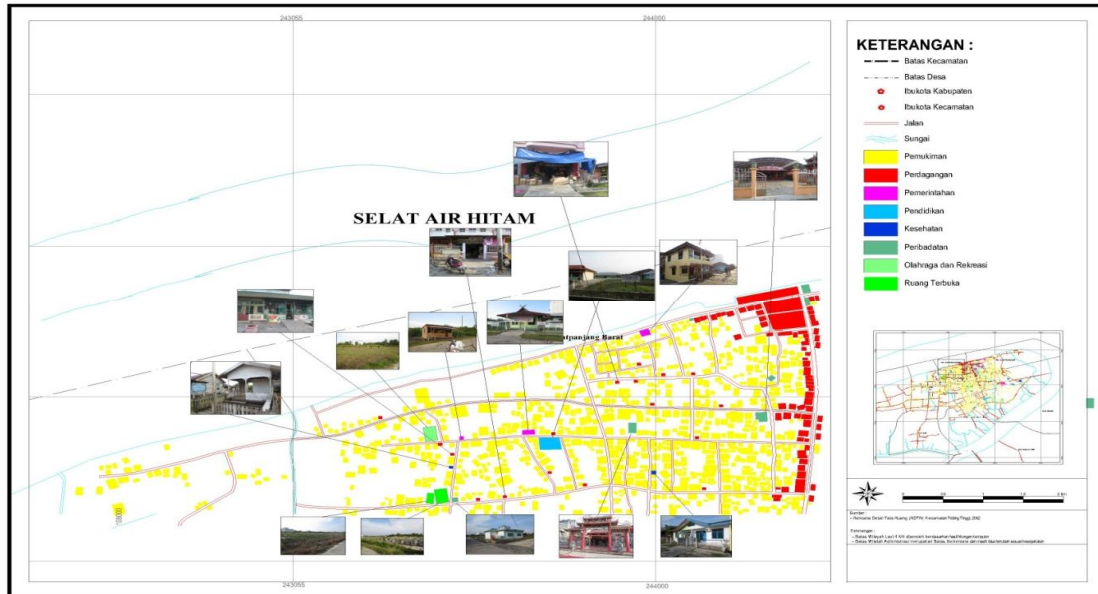
Ketersediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum yang terdapat di wilayah studi berupa Kantor Lurah Selatpanjang Barat yang berada di Jalan Ibrahim (Gambar 2). sebagai sarana pemerintahan dalam kondisi yang kurang layak dilihat dari segi struktur bangunan yang non permanen ditambah lagi dengan bangunan yang kecil yang sudah tidak dapat lagi menampung jumlah pegawai yang ada. Sarana lainnya adalah berupa satu unit pos hansip yang berada di Jalan Ibrahim dalam kondisi baik dan satu unit pos polisi yang berada di Jalan Sei Juling yang juga berada dalam kondisi baik.

### **Sarana ruang terbuka**

Ruang terbuka yang terdapat di wilayah studi berupa lapangan yaitu lapangan bola, pemakaman/kuburan (Gambar 2) yang berjumlah 2 unit yaitu perkuburan untuk umat Muslim dan perkuburan China. Jumlah kebutuhan seharusnya berjumlah 18 unit lapangan dengan persebaran merata pada setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Perbaikan sarana ruang terbuka dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih terdapat di wilayah studi untuk lapangan olahraga sebagai sarana ruang terbuka.

### Sarana perdagangan dan jasa

Kebutuhan sarana perdagangan dan jasa (Gambar 2) di wilayah studi pada umumnya dalam kondisi baik dilihat dari kondisi struktur bangunan, ketersediaan sarana dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah pesisir Kota Selatpanjang pada khususnya. Terdapatnya satu unit pasar dengan skala kecamatan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah studi dan juga masyarakat Kota Selatpanjang.



Gambar 2. Peta persebaran sarana penunjang permukiman pesisir Kota Selatpanjang

### Penilaian Tingkat Kesesuaian Kondisi Sarana Penunjang Kegiatan Sosial Budaya dan Perkonomian

Penilaian sama halnya dengan penilaian kondisi hunian sebagai ruang tinggal yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS) dan Sesuai (S) dengan penilaian antara 1 sampai dengan 3.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesesuaian sarana permukiman sebagai penunjang kegiatan sosial budaya dan ekonomi diperoleh jenis sarana penunjang permukiman dengan tingkat penilaian Kurang Sesuai (KS) yaitu sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, dan sarana ruang terbuka. Sedangkan jenis sarana dengan tingkat penilaian Sesuai (S) adalah sarana pendidikan dan sarana perdagangan dan jasa. Sehingga diperlukan adanya perbaikan maupun penyediaan sarana permukiman yang memiliki kategori “Kurang Sesuai”.



Tabel 2. Penilaian Tingkat Kesesuaian Sarana Sebagai Penunjang Kegiatan Sosial Budaya dan Perekonomian di Permukiman Pesisir Kota Selatpanjang

No	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan (unit)	Kondisi	Tingkat Kesesuaian	Skor
1.	Sarana Kesehatan						
	a. Praktek dokter	1	4472	1	Cukup baik	Sesuai	2
	b. Posyandu	4		3	Buruk	Sesuai	2
Rata-rata nilai							2
2.	Sarana Pendidikan						
	a. SD	1	4472	1	Baik	Baik	3
Rata-rata nilai							3
3.	Sarana Peribadatan						
	a. Musholla / langgar	1	4472	5	Buruk	Tidak sesuai	1
	b. Masjid warga	1		1	Buruk	Sesuai	2
	c. Vihara	4		4	Baik	Sesuai	3
Rata-rata Nilai							2
4.	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum						
	a. Pos hansip	1	4472	2	Baik	Kurang sesuai	2
	b. Kantor desa/ lurah	1		1	Buruk	Sesuai	2
Rata-rata nilai							2
5.	Sarana Ruang Terbuka						
	a. Taman/ Lapangan	1	4472	18	Cukup baik	Tidak sesuai	2
	b. Pemakaman	1		1	Baik	Sesuai	3
	c. Parkir umum	0		2	-	Tidak sesuai	1
Rata-rata nilai							2
6.	Sarana Perdagangan dan Jasa						
	a. Kios/ Toko	22	4472	18	Baik	Sesuai	3
	b. Pasar	1		1	Baik	Sesuai	3
Rata-rata nilai							3

*Sumber : Hasil analisis, 2013*

### **III. Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Pesisir Kota Selatpanjang**

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dijelaskan strategi-strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Penertiban pemanfaatan lahan
  - a. Penentuan batas wilayah sempadan pantai
  - b. Relokasi
2. Peningkatan fungsi hunian sebagai ruang tinggal
  - a. Memperbaiki struktur bangunan rumah dari non permanen menjadi semi permanen dan permanen
  - b. Penambahan jumlah ruang dalam hunian dengan alternatif melalui pembangunan secara vertikal
  - c. Penyediaan sarana air bersih dengan penyediaan alternatif sumber air bersih berasal dari sumber air tanah dengan penambahan sumur gali dan juga PDAM
  - d. Penyediaan fasilitas kamar mandi disertai fasilitas untuk kegiatan buang air (tinja) melalui penyediaan MCK (Mandi Cuci Kakus) umum
  - e. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti wadah komunal, gerobak sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
  - a. Penghijauan
  - b. Pengelolaan kawasan sempadan pantai
  - c. Pemberian penyuluhan mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat
4. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang permukiman
  - a. Perbaikan dan penyediaan prasarana jalan dan drainase
  - b. Penambahan fasilitas praktek dokter berupa peningkatan kualitas pelayanan seperti penambahan ruang, dan alat-alat penunjang kesehatan
  - c. Penyediaan sarana penunjang permukiman seperti sarana peribadatan berupa penambahan 4 unit musholla, 1 unit pos hansip, dan taman/lapangan yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

### **KESIMPULAN**

Karakteristik kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang didominasi oleh penggunaan lahan terbangun yang mayoritas digunakan sebagai permukiman penduduk, kondisi permukiman sebagian besar merupakan permukiman non permanen dan semi permanen, dan belum terdapatnya bangunan pengaman pantai.

Tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman sebagai ruang tinggal dengan komponen legalitas hunian, struktur bangunan, luas ruang per penghuni, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas kamar mandi, pelayanan persampahan dan jaringan listrik didapatkan bahwa kondisi hunian “Kurang Sesuai” sebagai ruang tinggal, selanjutnya tingkat kesesuaian sarana sebagai penunjang kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir Kota Selatpanjang dengan komponen penilaian sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, ruang terbuka, perdagangan dan jasa

didapatkan hasil “Kurang Sesuai”, sehingga diperlukan adanya perbaikan maupun penyediaan sarana permukiman.

Strategi pengelolaan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang dapat dilakukan dengan penertiban pemanfaatan lahan, peningkatan fungsi hunian sebagai ruang tinggal, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang permukiman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimus. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- . 2007. Kriteria Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum : Jakarta.
- . 2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum : Jakarta
- Doxiadis, CA. 1968. An Introduction To The Science of Human Settlement Ekistics. London : Hutchinson of London.
- Gulo, W. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : Grasindo.
- Kusmayadi & Sugiarto, S. 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, A. 2003. Strategi Pengelolaan Permukiman Nelayan dengan Pendekatan Partisipatif. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Prihatini, R. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penataan Permukiman Kumuh. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun, M. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3S : Jakarta.
- Sueca, N.P. 2004. Permukiman Kumuh, Masalah atau Solusi?, Jurnal Permukiman Natah Vol. 2, No. 2, Agustus 2004 : 56 - 107. Denpasar : Universitas Udayana, Teknik Arsitektur.
- Suganda, E. 2009. Menelaah Ruang Bertinggal Manusia Pada Permukiman di Sekitar Pasar. Manakara Sosial Humaniora Vol. 13, No. 1, Juli 2009 : 57-65. Depok : Universitas Indonesia, Teknik Arsitektur.